



DAMPAK NEGATIF REKLAMASI TELUK JAKARTA

Muhammad Mulyadi*)

Abstrak

Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.

Pendahuluan

Pada akhir dasawarsa 1950-an istilah 'pembangunan' sering dianggap sebagai 'obat' terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya 'Teori Pertumbuhan'. Menurut Clark (1991:20), "pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat 'pembangunan' sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan taraf kehidupan manusia".

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang bertujuan

untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Menurut Garna (1992:1) perubahan sosial terjadi karena adanya proses pembangunan yang dilakukan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, pada umumnya merupakan proses yang terkendali oleh pola perencanaan yang disebut 'pembangunan'.

Aktivitas pembangunan ini sering dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya, terutama penggunaan lahan, seringkali menimbulkan permasalahan sendiri. Hal ini disebabkan keterbatasan

*) Peneliti Madya Hubungan Masyarakat dan Negara pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: mohammadmulyadi@yahoo.co.id



lahan karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak proporsional. Inilah yang terjadi di Jakarta saat ini. Proses pembangunan menyebabkan terjadinya perebutan penggunaan lahan. Untuk memenuhi kebutuhan akan lahan, muncul kebijakan pembangunan, salah satunya upaya reklamasi Teluk Jakarta. Pada dasarnya, reklamasi dilakukan untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi ini menimbulkan dampak sosial yang buruk terhadap masyarakat. Tulisan ini mengangkat dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta bagi masyarakat.

Beberapa Dampak negatif Sosial Reklamasi Teluk Jakarta

Secara umum, upaya reklamasi Teluk Jakarta menyebabkan 2 kerugian, yaitu:

a. Penggusuran Tempat Tinggal

Dampak sosial yang paling terasa di masyarakat akibat adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta adalah penggusuran. Di kota besar seperti Jakarta, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah serta melenyapkan aset hunian. Masyarakat yang dulunya hidup dalam satu komunitas nelayan Teluk Jakarta kini tercerai berai akibat wilayah pemukiman mereka digusur untuk dibangun berbagai sarana penunjang reklamasi yang akan dilakukan.

Penggusuran adalah pengusiran paksa, baik secara langsung maupun tak langsung, yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalannya lahan. Di wilayah rural, penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar, seperti pada proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Penggusuran yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan serta hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh

Undang-undang, tentu saja meninggalkan dampak yang cukup kompleks, yaitu makin meningkatnya jumlah warga miskin, rasa tidak percaya lagi pada pemerintah, dan rasa benci serta dendam terhadap perlakuan kasar oleh aparat di lapangan.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penataan seharusnya tidak digunakan untuk menekan kelompok warga kelas bawah penghuni kawasan/ lahan tertentu. Ada 2 hal yang perlu diingat terkait proses penggusuran ini. *Pertama*, kawasan hunian warga umumnya bukanlah tempatan baru, bahkan memiliki nilai sejarah tersendiri yang bisa dianggap sebagai bagian dari situs budaya. Aksi gusur paksa seperti itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah mengabaikan pertimbangan psiko-sosiobudaya, di mana suatu kawasan yang sudah lama dan memiliki sejarah, niscaya jiwa para penghuninya sudah pula "menyatu dengan tanah dan lingkungan tempat tinggal mereka" itu.

Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan juga tidak lepas dari riwayat tanah yang sudah berpindah tangan dari beberapa generasi. Banyak tanah yang berstatus *verponding*, yakni status tanah yang ditetapkan menurut hukum Belanda atau kemudian ada yang diubah statusnya menjadi *verponding* Indonesia, namun tidak diurus statusnya oleh pemilik sekarang. Akibat kelengahan pihak pemilik *verponding* itulah kemudian pihak pemerintah menganggapnya sebagai milik negara atau tanah tak bertuan.

Kedua, kawasan permukiman yang sekumuh apapun tampilan fisiknya, merupakan produk dari sejarah perencanaan dan penataan kota/wilayah yang buruk. Jakarta atau umumnya kota-kota tua dan besar di Indonesia ini berkembang secara alami dengan secara relatif tidak direncanakan dengan baik. Para penghuni kawasan yang kini kumuh, saat awal dihuni dan dibangun, terus saja dibiarkan oleh pemerintah, dianggap sudah menjadi milik dan bagian dari hidup mereka. Sehingga kalau sekarang dibongkar paksa, maka sama halnya menunjukkan rendahnya kepedulian pengambil kebijakan sebelumnya, dan sekaligus secara arogan mempertontonkan kehebatan sang penguasa sekarang.

b. Kehilangan Mata Pencaharian

Kehilangan mata pencaharian merupakan dampak sosial sekaligus ekonomi yang dirasakan oleh warga. Proses pembangunan di Teluk Jakarta telah merusak ekosistem di sekitar pantai, serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumberdaya perairan laut. Hal ini menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan dan berbagai sumber daya laut lainnya yang selama ini menjadi penghidupan mereka. Kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat pendapatan nelayan, tetapi juga menjadikan nelayan jatuh ke jurang kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian.

Kemiskinan adalah akar dari sebagian besar terjadinya tindak kriminalitas. Kita seringkali mendengar atau membaca berita tentang pencurian, perampokan atau pembunuhan yang bermotif kemiskinan ekonomi dari pelakunya. Tidak sedikit pula berita tentang kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan yang disebabkan kemiskinan.

Kemiskinan juga merupakan suatu produk ketidakadilan bahkan kezaliman pemimpin, hukum, atau sistem, bahkan ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan menempatkan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak perlu diperhatikan dan menjadikan mereka sebagai salah satu subsistem negara yang berada pada posisi 'teraniaya'. Ini dapat dilihat dari tidak adanya ruang bagi masyarakat miskin untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi secara baik.

Antisipasi Dampak Sosial Reklamasi

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan suatu wilayah, pemenuhan kebutuhan lahan menjadi permasalahan utama di banyak wilayah. Kebijakan reklamasi kawasan pesisir dimungkinkan akan diambil di banyak wilayah di Indonesia –yang memiliki kawasan pesisir luas– sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan akan lahan. Untuk mengantisipasi munculnya dampak sosial dari kebijakan tersebut, perlu ada perencanaan yang matang sehingga kebijakan tersebut tidak membawa dampak negatif baik dari sisi sosial, ekonomi, ataupun lingkungan.

Menurut Gunawan Tjahjono, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan dari reklamasi dan untuk siapa reklamasi dilakukan. Dua hal tersebut perlu menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan untuk penyusunan perencanaan lebih lanjut dari kebijakan reklamasi, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Seperti pada kasus Teluk Jakarta, menurut hemat penulis, dengan mengacu dua hal tersebut di atas, relokasi penduduk pesisir ke lokasi yang jauh dari tempat mereka mencari ikan tidak seharusnya dilakukan. Jika reklamasi teluk Jakarta memang ditujukan untuk mengatur kawasan kumuh di daerah tersebut, maka penataan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan membuat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sekitar kawasan pesisir. Pemukiman menjadi tertata, mereka pun tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka, yaitu melaut. Selain itu, upaya relokasi harus dilakukan sebelum proyek reklamasi dilakukan dengan memberikan cukup waktu bagi masyarakat beradaptasi dengan lingkungan baru.

Penutup

Reklamasi Teluk Jakarta telah mengakibatkan masyarakat di wilayah pesisir Teluk Jakarta tergusur dari tempat tinggalnya dan kehilangan mata pencaharian. Saat ini Pemerintah telah menghentikan untuk sementara kebijakan reklamasi. Upaya Pemerintah Daerah DKI merelokasi masyarakat pesisir ke rusunawa yang lokasinya jauh dari pesisir dan laut tempat mereka bekerja, belum mengatasi dampak sosial dari reklamasi.

Berangkat dari kasus reklamasi Teluk Jakarta, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak ketika kebijakan reklamasi kawasan pesisir akan dilakukan. Tujuan dari reklamasi dan untuk siapa reklamasi dilakukan adalah harus menjadi perhatian utama untuk penentuan kebijakan reklamasi dilakukan. DPR melalui fungsi pengawasannya dapat mempertanyakan kepada pemerintah tentang kedua hal tersebut sebelum kebijakan reklamasi ditetapkan. Dari dua hal tersebut antisipasi dampak negatif dapat dilakukan.

Referensi

- “Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta”, <http://halloapakabar.com/dampak-sosial-reklamasi-teluk-jakarta-berdasarkan-kajian-pk2pm-dan-seanet-indonesia>, diakses tanggal 20 April 2016.
- “OPINI: Reklamasi Teluk Jakarta, untuk Siapa?”, liputan6 25 April 2016, <http://news.liputan6.com/read/2492064/opini-reklamasi-teluk-jakarta-untuk-siapa>, diakses tanggal 27 April 2016.
- “Proyek reklamasi Teluk Jakarta 'membuat cemas' nelayan”, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/11/151127_majalah_lingkungan_telukjakarta, diakses tanggal 21 April 2016.
- Aditya Fathurrahman. “Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, <http://hmip.fisip.ui.ac.id/proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-sebagai-mesin-pertumbuhan-kota-jakarta>, diakses tanggal 21 April 2016.
- Ahmad Mony dan Muhammad Karim. “Reklamasi Teluk Jakarta, Penggusuran dan Dampaknya”, <http://hallojakarta.com/reklamasi-teluk-jakarta-penggusuran-dan-dampaknya>, diakses tanggal 20 April 2016.
- Clark, John. 1991. *Democratizing Development : The Role of Voluntary Organizations*. Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Garna, Judistira, K. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Puteri Rosalina. “Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta dari Era Soeharto sampaiAhok”,<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/>, diakses tanggal 20 April 2016.